MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 7 Tahun 2026

OPTIMALISASI PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MENDUKUNG AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH: STUDI LITERATUR

Natalia Asmiyanti Sainur, Naomi Rivana Magdalena, Taufik Kurniawan
S1 Akuntansi, STIE Mahardhika Surabaya

Email: sasimyiy@gmail.com, naomirivana333@gmail.com, nicetaufik@gmail.com

ABSTRAK

Audit internal memiliki peran strategis dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah melalui penguatan sistem pengendalian internal dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. Pengelolaan keuangan negara yang transparan, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Artikel ini bertujuan untuk membahas peran audit internal dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah melalui fungsi pengawasan, audit internal memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta mengidentifikasi potensi risiko dalam pengelolaan keuangan. pencegahan kecurangan (*fraud*). Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan kajian teori dari berbagai literatur dan regulasi terkait audit internal serta akuntabilitas sektor publik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa audit internal memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, mendukung transparansi pengelolaan anggaran, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pemerintah. Selain itu, audit internal juga berperan dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan keuangan yang dapat merugikan negara. Dengan pelaksanaan audit internal yang independen dan profesional, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, penguatan fungsi audit internal menjadi langkah strategis dalam mendukung terciptanya akuntabilitas keuangan pemerintah yang optimal.

Kata Kunci: audit internal, akuntabilitas keuangan, pemerintah, pengendalian internal, good governance.

ABSTRACT

Internal audit plays a strategic role in supporting the accountability of government financial management by strengthening internal control systems and overseeing the use of public budgets. Transparent, effective financial management that complies with laws and regulations is very necessary for creating good governance. This article aims to discuss the role of internal audit in enhancing government financial accountability through its supervisory function. Internal audit ensures compliance with regulations and identifies potential risks in financial management, including fraud prevention. The method used in this article is a qualitative descriptive approach with a review of theories from various literature and regulations related to internal audit and public sector accountability. The discussion results show that internal audit has a significant contribution in strengthening control systems internal,

Article history
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

improving compliance with regulations, supporting transparency in budget management, as well as increasing the efficiency and effectiveness of government programs. In addition, internal audits also play a role in detecting and preventing financial irregularities that could harm the state. With the implementation of independent and professional internal audits, the government can improve the quality of public financial management and strengthen public trust in government performance. Therefore, strengthening the internal audit function becomes a strategic step in supporting the creation of optimal government financial accountability.

Keywords: internal audit, financial accountability, government, internal control, good governance.

PENDAHULUAN

Reformasi sektor publik menuntut adanya sistem pengawasan yang mampu menjamin efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam pemanfaatan anggaran negara (Nst et al., 2026). Dalam konteks ini, auditor internal berfungsi sebagai garda terdepan yang memastikan integritas data keuangan melalui evaluasi sistem pengendalian intern serta pemberian rekomendasi strategis demi mencegah terjadinya praktik kecurangan.

Akuntabilitas keuangan pemerintah merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat secara transparan, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan pemerintah sering menghadapi berbagai tantangan seperti penyalahgunaan anggaran, lemahnya pengawasan, ketidakefisienan program, hingga praktik korupsi. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan secara tertib dan akuntabel.

Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan pemerintah adalah audit internal. Audit internal berfungsi sebagai kegiatan pengawasan independen di dalam organisasi pemerintah yang bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses tata kelola. Kehadiran audit internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah. Meskipun berbagai penelitian telah membahas audit internal dalam sektor publik, masih terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana fungsi audit internal berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah di tengah kompleksitas pengelolaan anggaran dan tuntutan transparansi publik yang semakin tinggi.

Artikel ini membahas secara teoritis mengenai peran audit internal dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah, mulai dari pengertian audit internal, konsep akuntabilitas keuangan pemerintah, hingga kontribusi audit internal dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran audit internal dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah melalui

penguatan pengendalian internal, peningkatan kepatuhan, pencegahan kecurangan, serta dukungannya terhadap penerapan *good governance*.

TEORI

Pengertian Audit Internal

Audit internal merupakan aktivitas penjaminan dan konsultatif yang dilakukan secara independen untuk membantu organisasi meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, sistem pengendalian, dan tata kelola sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan disiplin dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Dalam sektor pemerintahan, audit internal dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), seperti inspektorat daerah, inspektorat jenderal kementerian, maupun lembaga pengawasan lainnya. Audit internal bertujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah telah sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, dan akuntabilitas.

Audit internal memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. **Fungsi Pengawasan**

   Audit internal melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. **Fungsi Evaluasi**

   Audit internal menilai efektivitas sistem pengendalian internal dan memberikan rekomendasi perbaikan.

3. **Fungsi Konsultasi**

   Auditor internal memberikan saran dan masukan kepada manajemen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan operasional.

4. **Fungsi Pencegahan Fraud**

   Audit internal membantu mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan serta kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Pelaksanaan Audit Internal

Pengertian empat Langkah kerja pelaksanaan audit internal adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan Audit**

Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses audit internal. Pada tahap ini auditor menentukan tujuan audit, ruang lingkup pemeriksaan, metode yang akan digunakan, serta menyusun program audit. Auditor juga melakukan identifikasi risiko dan mengumpulkan informasi awal terkait aktivitas atau unit yang akan diaudit. Perencanaan yang

baik akan membantu auditor melaksanakan pemeriksaan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Audit

Tahap pelaksanaan audit dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bukti audit yang relevan, memadai, dan dapat dipercaya. Auditor melakukan observasi, wawancara, pemeriksaan dokumen, serta pengujian terhadap sistem dan prosedur yang berlaku. Hasil analisis bukti tersebut digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan, efektivitas pengendalian internal, serta mengidentifikasi potensi kelemahan atau penyimpangan yang terjadi dalam organisasi.

3. Pelaporan Audit

Setelah proses pemeriksaan selesai, auditor menyusun laporan audit yang berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan. Laporan audit harus disusun secara objektif, jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Rekomendasi yang diberikan bertujuan membantu manajemen memperbaiki kelemahan yang ditemukan serta meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi.

4. Tindak Lanjut Audit

Tindak lanjut merupakan tahap akhir dalam pelaksanaan audit internal. Pada tahap ini auditor memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan kepada pihak terkait. Tujuan tindak lanjut adalah memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilaksanakan secara efektif sehingga kelemahan atau permasalahan yang ditemukan tidak terulang kembali. Keberhasilan tindak lanjut menjadi indikator penting dalam mengukur efektivitas fungsi audit internal dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas organisasi.

Pelaksanaan adudit internal lebih ringkasnya adalah sebagai berikut:

Tahapan	Kegiatan Utama
Perencanaan	Menentukan tujuan, ruang lingkup, dan program audit
Pelaksanaan	Mengumpulkan dan menganalisis bukti audit
Pelaporan	Menyusun laporan dan rekomendasi
Tindak lanjut	Memastikan rekomendasi dilaksanakan

Tanggung Jawab Audit Internal

Auditor internal bertanggung jawab dalam memberikan penilaian independen terhadap efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, pengelolaan risiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan kinerja organisasi sektor publik. Menurut Amin Widjaja (Tunggal, 2000), tanggung jawab departemen audit internal sebagai berikut:

1. Tanggung jawab direktur audit internal adalah menerapkan program audit internal perusahaan.
2. Direktur audit internal mengarahkan personel dan aktivitas departemen audit internal, juga menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program yang telah dibuat untuk persetujuan.
3. Tanggung jawab audit supervisor adalah membantu direktur audit internal dalam mengembangkan program audit tahunan dan membantu dalam mengkoordinasikan usaha audit dengan auditor independen agar memberikan cakupan audit yang sesuai tanpa duplikasi usaha.
4. Tanggung jawab senior auditor adalah menerima program audit dan instruksi untuk area audit yang ditugaskan oleh supervisor audit. Senior auditor memimpin staf auditor dalam pekerjaan lapangan audit.
5. Tanggung jawab staf auditor adalah melaksanakan tugas audit pada suatu lokasi audit.

Dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa tanggung jawab auditor internal sangat luas tergantung dari besar kecilnya organisasi yang bersangkutan. Dalam menjalankan tanggung jawabnya audit internal terbagi menjadi beberapa bagian, yang setiap bagiannya memiliki tanggung jawab yang berbeda. Oleh karena itu, pimpinan audit internal harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang tertulis maupun tidak tertulis. Cukup luasnya tanggung jawab audit internal memerlukan suatu konsep yang dapat diterapkan oleh setiap bagian audit internal ataupun dengan auditi agar memperoleh kemudahan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Konsep tersebut dapat berupa konsep kemitraan dengan pihak manajemen yang akan memperkuat kebebasan pengawas internal dalam mengemukakan pendapat dan akan meningkatkan efektivitas pengawas secara keseluruhan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang luas yang mensyaratkan entitas memberikan laporan mengenai penggunaan atas uang-uang publik dan kinerjanya. Akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa jenis dan informasi tertentu dapat relevan dalam cara yang berbeda untuk memperoleh pertimbangan mengenai akuntabilitas. Mardiasmo (2004:67) mengatakan:

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak yang memegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenagan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut” Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang memberi mereka kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas dalam laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkaran yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban dan dalam suasana yang transparan dan demokratis serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

Konsep Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

Akuntabilitas keuangan pemerintah merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Akuntabilitas mencakup aspek pelaporan, transparansi, kepatuhan terhadap hukum, dan pencapaian tujuan penggunaan anggaran.

Akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki beberapa dimensi, antara lain:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Pemerintah wajib mengelola keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Akuntabilitas Proses

Pengelolaan keuangan harus dilakukan melalui prosedur yang benar, sistematis, dan transparan.

3. Akuntabilitas Program

Program pemerintah harus dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Setiap kebijakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun moral kepada publik.

Akuntabilitas keuangan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan profesional.

Peran Audit Internal dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

1. Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal

Audit internal berperan penting dalam mengevaluasi sistem pengendalian internal pemerintah. Sistem pengendalian yang baik akan membantu mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, maupun penyalahgunaan anggaran. Auditor internal melakukan penilaian terhadap prosedur administrasi, mekanisme pelaporan, serta kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku.

Melalui evaluasi tersebut, audit internal dapat memberikan rekomendasi perbaikan untuk memperkuat sistem pengendalian sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih tertib dan akuntabel.

2. Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan (Fraud)

Salah satu masalah utama dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah praktik fraud atau kecurangan. Audit internal berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap indikasi penyimpangan anggaran, manipulasi laporan keuangan, maupun penyalahgunaan wewenang.

Dengan adanya audit internal yang efektif, potensi kerugian negara dapat diminimalkan karena auditor dapat mengidentifikasi kelemahan sistem dan memberikan tindakan korektif sebelum masalah berkembang lebih besar.

3. Meningkatkan Kepatuhan terhadap Peraturan

Audit internal memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar akuntansi pemerintahan, dan kebijakan yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan sangat penting untuk menjaga legitimasi dan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran publik.

Melalui kegiatan audit, auditor internal dapat menemukan pelanggaran administrasi maupun ketidaksesuaian penggunaan anggaran sehingga pemerintah dapat segera melakukan perbaikan.

4. Mendukung Transparansi Pengelolaan Keuangan

Audit internal membantu menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah melalui pemeriksaan dan pelaporan yang objektif. Hasil audit dapat menjadi dasar evaluasi bagi pimpinan pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan bertanggung jawab. Transparansi yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena publik dapat mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan.

5. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Program Pemerintah

Selain memeriksa kepatuhan, audit internal juga menilai apakah program pemerintah telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Auditor internal mengevaluasi penggunaan sumber daya serta pencapaian target program.

Jika ditemukan pemborosan atau program yang tidak efektif, auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan sehingga penggunaan anggaran dapat lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

6. Mendukung Good Governance

Audit internal merupakan salah satu pilar penting dalam penerapan prinsip *good governance*. Dengan adanya pengawasan internal yang kuat, pemerintah dapat meningkatkan integritas, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan negara.

Audit internal juga membantu menciptakan budaya organisasi yang lebih disiplin dan bertanggung jawab sehingga kualitas pelayanan publik dapat meningkat.

Tantangan Audit Internal di Sektor Pemerintahan

Meskipun memiliki peran penting, pelaksanaan audit internal di sektor pemerintahan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- Kurangnya independensi auditor internal.
- Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten.
- Lemahnya tindak lanjut atas rekomendasi audit.

- Intervensi pihak tertentu dalam proses pengawasan.
- Perkembangan teknologi dan kompleksitas pengelolaan keuangan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas auditor internal, peningkatan profesionalisme, serta dukungan penuh dari pimpinan pemerintah terhadap fungsi pengawasan internal. Selain itu, sinergi antara kebijakan audit eksternal dan penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menjadi prasyarat mutlak untuk meminimalisir risiko penyimpangan keuangan secara sistemik. Implementasi pendekatan audit berbasis risiko yang sistematis dan objektif juga diperlukan agar auditor dapat memberikan nilai tambah melalui evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas manajemen risiko dan tata kelola organisasi sekaligus memperkuat peran strategis auditor dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur (*literature review*). Literatur yang digunakan merupakan artikel ilmiah, buku, dan regulasi yang diterbitkan dalam rentang tahun 2020–2025 dan memiliki relevansi dengan topik audit internal serta akuntabilitas keuangan pemerintah. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran audit internal dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah melalui kajian berbagai sumber pustaka yang relevan. Penelitian tidak dilakukan secara langsung di lapangan, melainkan berfokus pada penelaahan dan analisis informasi yang berasal dari berbagai referensi ilmiah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan audit internal dan akuntabilitas keuangan pemerintah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai pendekatan analisis kualitatif. , yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai teori serta hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran audit internal dalam mendukung akuntabilitas keuangan pemerintah. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, proses sintesis dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola tematik yang muncul dari studi terdahulu, terutama terkait hambatan operasional dan kebutuhan akan inovasi sistem audit di sektor public, termasuk penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

Integrasi teknologi digital ini menjadi krusial dalam menghadapi kompleksitas data keuangan modern serta dinamika operasional sektor publik yang terus berkembang . Penerapan audit berbasis teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemeriksaan sekaligus memperkuat ketahanan sistem terhadap risiko kecurangan yang semakin canggih. Selain itu, sinergi antara tata kelola yang baik dan audit yang efektif terbukti krusial dalam menjamin keandalan serta akurasi laporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah

PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas audit internal sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pengendalian internal yang diterapkan instansi pemerintah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa pengawasan internal yang efektif mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan memperkuat akuntabilitas organisasi sektor publikDalam konteks ini, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memegang peranan krusial untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola dan memastikan bahwa setiap tahapan pelaporan keuangan telah mengikuti standar basis akrual yang berlaku. Integrasi antara pemetaan risiko sistematik dan kepatuhan terhadap standar global memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan secara dini sekaligus memperkuat objektivitas dalam pelaporan.

Meskipun efektivitas fungsi audit internal terbukti memiliki korelasi positif terhadap kualitas laporan keuangan, terdapat tantangan nyata di mana respon yang lambat atau kurang tepat dari pihak yang diaudit sering kali menghambat efektivitas rekomendasi yang diberikan (Sari & Setyowati, 2021), terutama akibat lemahnya sinergi dan koordinasi antara APIP dengan auditi dalam menindaklanjuti temuan lapangan (Runtu et al., 2025). Selain itu, optimalisasi peran APIP juga sangat bergantung pada peningkatan kapabilitas aparat dalam melakukan reviu laporan keuangan secara komprehensif, guna memastikan akurasi data serta kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

Lebih lanjut, transformasi peran auditor internal dari sekadar pemeriksa menjadi konsultan diharapkan mampu mendorong budaya pencegahan kecurangan melalui pemberian peringatan dini dan reviu berkala atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Analisis empiris menunjukkan bahwa efektivitas audit internal, yang didukung oleh kompetensi dan independensi auditor, memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pelaksanaan audit internal sangat dipengaruhi oleh kualitas auditor yang menjalankan fungsi pengawasan. Auditor yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan pemahaman yang baik terhadap proses pengelolaan keuangan akan lebih mudah mengidentifikasi berbagai risiko maupun kelemahan yang ada dalam organisasi.

Di samping itu, sikap independen yang dimiliki auditor memungkinkan proses audit dilakukan secara objektif tanpa adanya kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi hasil pemeriksaan. Kondisi ini pada akhirnya mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, penerapan standar audit internal yang konsisten berfungsi sebagai instrumen krusial dalam mendeteksi potensi kecurangan serta memastikan kepatuhan organisasi terhadap regulasi yang berlaku.

Penerapan standar audit yang dilakukan secara konsisten membantu auditor menjalankan pemeriksaan secara sistematis dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya pedoman yang jelas, proses audit dapat menghasilkan informasi yang lebih andal serta mampu mengungkap berbagai bentuk penyimpangan sejak tahap awal. Tidak hanya itu, standar audit juga berperan dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga risiko pelanggaran dapat diminimalkan. Sinergi antara sistem pengendalian internal dan pengawasan independen memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan transparansi serta memperkuat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah kepada masyarakat dan memperkuat akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan. Keberadaan sistem pengendalian internal membantu organisasi dalam menjaga

agar setiap kegiatan berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, pengawasan independen berfungsi untuk menilai apakah sistem tersebut telah berjalan secara efektif. Ketika keduanya diterapkan secara bersamaan, proses pengawasan menjadi lebih kuat sehingga dapat meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan serta memperkuat pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat. Auditor internal harus mampu mengoptimalkan segenap potensi intelektual dan keterampilan teknisnya untuk memastikan bahwa setiap fakta keuangan disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi.

Namun demikian, efektivitas peran tersebut sering kali terhambat oleh keterbatasan kompetensi teknis auditor serta kurangnya tindak lanjut yang memadai atas rekomendasi hasil audit yang diberikan (Williyanto et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan audit internal di sektor publik. Kemampuan teknis yang belum memadai dapat menyulitkan auditor dalam menghadapi kompleksitas pengelolaan keuangan dan perkembangan teknologi yang terus berubah. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan dari proses audit sering kali belum ditindaklanjuti secara optimal oleh pihak terkait sehingga manfaat audit sebagai sarana perbaikan organisasi menjadi kurang maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur, audit internal memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah melalui penguatan pengendalian internal, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, pencegahan kecurangan, dan dukungan terhadap penerapan prinsip good governance. Namun demikian, efektivitas fungsi audit internal masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi auditor, kurang optimalnya tindak lanjut rekomendasi audit, dan potensi gangguan terhadap independensi auditor. Oleh karena itu, penguatan kapasitas APIP dan peningkatan komitmen pimpinan instansi menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan peran audit internal di sektor publik.

SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan independensi audit internal.
   Pemerintah perlu memperkuat posisi dan independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar proses audit dapat dilakukan secara objektif dan profesional tanpa adanya intervensi dari pihak tertentu.
2. Meningkatkan kompetensi auditor internal.
   Pengembangan kompetensi auditor perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi profesi. Hal ini penting agar auditor mampu menghadapi perkembangan regulasi, teknologi, serta kompleksitas pengelolaan keuangan pemerintah.
3. Mengoptimalkan tindak lanjut hasil audit.
   Setiap instansi pemerintah perlu meningkatkan komitmen dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan auditor internal. Tindak lanjut yang baik dapat membantu memperbaiki kelemahan sistem dan mencegah terulangnya kesalahan yang sama.
4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam proses audit.
   Penggunaan teknologi digital, seperti sistem audit berbasis elektronik dan analisis data, perlu terus dikembangkan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan pengawasan.
5. Memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Penguatan SPIP diperlukan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang lebih baik sehingga pengelolaan keuangan pemerintah dapat berjalan secara transparan, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Meningkatkan kerja sama antara audit internal dan audit eksternal.

Sinergi yang baik antara auditor internal dan auditor eksternal dapat meningkatkan kualitas pengawasan serta mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Husain, F., Khairunnisa, K., & Sari, N. I. P. (2025). Peran Audit Internal Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. *VALUE*, *6*(1), 34-50.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2021). *Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)*. Jakarta: BPKP.

Institut Akuntan Publik Indonesia. (2021). *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. Jakarta: IAPI.

Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.

Sawyer, L. B., Dittenhofer, M. A., & Scheiner, J. H. (2020). *Sawyer's Internal Auditing* (7th ed.). Florida: The Institute of Internal Auditors.

World Bank. (2021). *Public Financial Management and Accountability in Government Institutions*. Washington, DC: World Bank.

Sari, H. C., & Setyowati, E. (2021). *PENGARUH EFEKTIVITAS FUNGSI AUDIT INTERNAL DAN IMPLEMENTASI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL STANDAR AKUNTANSI TENTANG PELAPORAN KEUANGAN KUALITAS*. *1*(2).

Runtu, V. A., Mustafa, D., & Juharni, J. (2025). Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Studi Kasus Di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Paradigma Journal of Administration*, *3*(2), 118–121.

Nst, D. A. D., Fauzia, M., Rizki, Mhd. N., Surahman, N. P., & Nurmayani. (2026). Efektivitas Audit Kinerja Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan*, *7*(1), 12–12.

Sinlaeloe, A., Polin, F., Laho'an, S. A. A., Tukan, A., Jesus, O. D., & Baso, S. P. (2026). Penerapan Audit Internal pada Organisasi Perangkat Daerah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION Economic Accounting Management and Business*, *9*(1), 184–191

Amirya, M. (2025). Challenges of Internal Auditing in the Indonesian Government. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *9*(2), 705–719.

Abdillah, M. I., Supardi, S., & Wijayanti, S. (2025). ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE, PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN FUNGSI AUDIT INTERNAL TERHADAP KEANDALAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *14*(1), 39–56.

ISSN : 3025-9495

Djasuli, M., & Risqillah, M. W. (2025). AUDITOR SEBAGAI AKTOR KUNCI DALAM PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN DI INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKALAN. *REMITTANCE JURNAL AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERBANKAN*, *6*(1), 174–186.

Nopriyanto, A. (2024). PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEUANGAN PERUSAHAAN PUBLIK. *Komitmen Jurnal Ilmiah Manajemen*, *6*(1), 1–11.

Sabrina, S. A., Pelu, I. E. A. S., & Helim, A. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengendalian Fraud: Peran Kompetensi, Independensi, dan Objektivitas Auditor Internal pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, *2*(6), 670–687.

Yusup, M., & Rahadian, Y. (2023). Evaluation of Capability Improvement of Government Internal Control Apparatus. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 48–62.

Bassasan, I., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ibrani, E. Y. (2024). Government policy in the field of audit and financial audit infrastructure on the smoothness of the supply chain and its implications on financial management compliance. *Uncertain Supply Chain Management*, *12*(3), 1657–1672.

Kartika, D. A., Aprilia, R., & Siregar, Y. D. (2024). Efektivitas Audit Internal dalam Manajemen Risiko dan Tata Kelola Perusahaan pada Sektor Keuangan. *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, *5*(2), 402–411.